

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker 2007: 5), Tenaga Kerja adalah penduduk yang sudah berumur 15 tahun keatas dan telah dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur. Di Indonesia batas umur tenaga kerja adalah 15 tahun dengan tanpa batas maksimum, dengan demikian yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah berumur 15 tahun atau lebih.

Di Indonesia penduduk dibawah umur 15 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja karena berdasarkan kenyataan , penduduk yang bekerja sudah berumur 15 tahun atau lebih, tetapi pada kenyataannya banyak penduduk yang berusia dibawah umur 15 tahun sudah bekerja, terutama di Desa-desa pada umur 10 tahun penduduknya sudah banyak yang bekerja. Sedangkan tidak adanya batas maksimum tenaga kerja di Indonesia karena belum adanya jaminan sosial,

sekalipun ada hanya sebagian kecil penduduk saja yang menerimanya (pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta dengan tunjangan hari tua / dana pensiun), untuk golongan inipun masih banyak yang tetap bekerja karena pendapatan yang mereka terima tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga sebagian besar dari mereka yang telah mencapai usia pensiun masih tetap bekerja. Oleh sebab itu mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja. (Sandjun H. Manulang, 1990: 4).

Sedangkan Menurut Dumairy, tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Angkatan Kerja

Adalah Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan, atau untuk sementara tidak sedang bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. (Dumairy, 1996 : 74-75).

2. Bukan Angkatan Kerja

Adalah bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja, yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan; yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar), mahasiswa, mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya.

(Dumairy, 1996 : 74-75)

B. Pengertian Kesempatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2003: 57) yang dimaksud kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila

lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada.

Sedangkan menurut Dwi Janarko (1995: 8) kesempatan kerja merupakan kesempatan bagi angkatan kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan harapan untuk mendapat imbalan yang dilakukannya. Usaha perluasan kesempatan kerja tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

1. Kependudukan
2. Letak Geografis dan Sumber Daya Alam
3. Kondisi Ekonomi
4. Kondisi Politik
5. Kondisi Sosial dan Budaya

C. Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja sama sekali atau penduduk yang bekerja kurang dari dua hari selama seminggu dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran meliputi:

1. Friksional

Adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada

2. Struktural

Adalah pengangguran yang terjadi karena adanya penambahan dalam struktur komposisi perekonomian

3. Musiman

Adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim (biasanya untuk para petani di luar masa panen mereka tidak memiliki kegiatan ekonomi).

D. Pengertian Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk yang dilakukan dari suatu daerah ke daerah lain dengan maksud untuk menetap (minimal 6 bulan di daerah baru). Migrasi terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Migrasi Antar Negara, antara lain:

- a. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain (masuknya Penduduk ke suatu negara).
- b. Emigrasi adalah Keluarnya penduduk dari suatu negara.
- c. Remigrasi adalah kembalinya penduduk ke negara asal

2. Migrasi Dalam Negeri,

Adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam suatu negara. Sedangkan menurut Munir, Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dari suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. (Munir, 2004: 55).

Migrasi Dalam negeri meliputi:

- a. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau / propinsi yang padat penduduknya ke pulau / propinsi yang jarang penduduknya.
- b. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau

perpindahan penduduk dari daerah yang kurang maju (kota kecil / kecamatan) ke daerah yang maju (kota besar / Ibukota propinsi, kota kabupaten, kota perdagangan, dll).

Menurut Munir (2004:1) Urbanisasi adalah sebagai bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan atau akibat dari perluasan daerah kota.

Urbanisasi dapat terjadi melalui dua cara yaitu: perpindahan penduduk dari desa ke kota (*rural urban migration*) dan kedua karena berubahnya daerah pedesaan yang karena beberapa faktor lambat laun menjadi daerah perkotaan (Sinulingga, 1999: 70).

- c. Remigrasi / Kembali ke Desa adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk kembali ke daerah asal.

E. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sadar, terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk percepatan / akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan, ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolute.

Pembangunan Ekonomi menurut Swasono, adalah merupakan suatu proses dari demokrasi baik secara politik (*political democratization*), sosial maupun ekonomi (*economic democratization*) untuk mencapai kemajuan (*progress*), kebebasan (*freedom*) serta mengurangi hambatan (*elimination of freedom*), di mana proses ini

juga merupakan proses dari humanisasi, disamping itu menumbuhkan pendapatan nasional (*Growth*) melalui penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi bahkan menghapus pengangguran dan kemiskinan. (Swasono, 2005: 22).

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri untuk memperbaiki nasib dan prakarsa, untuk menciptakan kemajuan material harus diprakarsai oleh yang bersangkutan dan tidak dapat dicangkokkan dari luar, kekuatan ini seyogyanya hanya untuk merangsang / membantu kekuatan nasional. Bantuan ini hanya bersifat mengawali / merangsang perubahan dan tidak bersifat mempertahankan. (M.L. Jhingan, 1998: 53).

Pembangunan ekonomi di negara berkembang memiliki tujuan dan sasaran dibidang sosial dan ekonomi dalam jangka panjang yang dianggap penting dalam menyediakan dasar-dasar yang konsepsional bagi suatu perencanaan. Adapun sasaran-sasaran ekonomi yang umum meliputi:

1. Peningkatan pendapatan per kapita yang cepat
2. Peningkatan penyediaan lapangan kerja yang tinggi
3. Tingkat harga yang relatif stabil
4. Pengurangan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan
5. Penganekaragaman dan perekonomian yang mandiri
6. Kadar neraca pembayaran yang baik.

F. Pendekatan Wilayah

Pembangunan yang dilaksanakan merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bersifat konstruktif menuju pencapaian tujuan yang lebih baik, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Mengingat luas serta tersebarnya wilayah pembangunan di Indonesia, dengan tingkat pembangunan daerah yang berbeda-beda antar daerah maka perlu peningkatan kerja sama antar daerah dalam pembangunan. Dengan demikian pembangunan daerah yang berlangsung benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Adapun tujuan pembangunan daerah antara lain untuk mengembangkan suatu daerah dengan memanfaatkan keuntungan yang ada di daerah sehingga tingkat pertumbuhannya mencapai optimum (Bintoro, 1990: 76).

Usaha-usaha pembangunan direncanakan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan regional dan sektoral, serta untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, selain itu adanya kebijaksanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi mereka dan untuk memperbaiki proses perencanaan pembangunan daerah.

Kebijaksanaan pembangunan daerah adalah suatu usaha pemerintah untuk mencapai pembangunan masing-masing daerah dalam ruang lingkup nasional, dengan kata lain dalam kebijaksanaan pembangunan pemerintah telah memperhitungkan aspek ruang. Kebijakan tersebut paling sedikit akan memperhitungkan pengaruh tempat atau ruang terhadap perencanaan sektoral. Perencanaan pembangunan daerah dalam arti tersebut masih dibantu oleh pendekatan wilayah berdasarkan daerah administratif. Konsekuensi digunakannya pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah lebih mempertegas asas desentralisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah serta mewujudkan asas dekonsentrasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dipergunakannya pendekatan pembangunan wilayah dalam kebijaksanaan pembangunan tersebut mempunyai arah/tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai pemerataan pertumbuhan antardaerah dan antarsektor
2. Untuk pemerataan hasil pembangunan secara geografis
3. Untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Oleh karena itu pendekatan pembangunan tersebut belum diarahkan pada sumber daya di setiap daerah yang bersangkutan.

G. Pengertian Wilayah

Berbicara tentang perwilayahan, sudah tentu tidak terlepas dari ilmu regional (ilmu wilayah) sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang baru ada di Indonesia pada pertengahan tahun tujuh puluhan, dimana pada saat itu telah dikemukakan suatu defenisi ilmu wilayah yang cukup umum sehingga dapat mencakup semua analisis wilayah, yaitu semua ilmu yang termasuk dalam

kelompok *Social Science* dan *Natural Science* dalam rangka penghayatan, pendalaman dan pengembangan suatu wilayah / region.

Berdasarkan definisi ilmu wilayah yang dikumpulkan oleh Fisher dan Isard (Ada 13 definisi), maka dapat ditarik beberapa unsur penting, antara lain:

1. Studi tentang wilayah atau sistem perwilayahan
2. Wilayah dipandang sebagai benda hidup yang dinamis / berubah dari waktu ke waktu sehingga unsur waktu dipandang sebagai salah satu variabel yang berperan dalam analisis.
3. Menitikberatkan interaksi bersama antara semua kegiatan
4. Mengarahkan pada efisiensi, pemerataan dan kesejahteraan social
5. Meneliti prinsip-prinsip dasar yang mengatur keseimbangan struktur
6. Mencari pemecahan secara efektif terhadap masyarakat.

H. Model Basis Ekonomi

Dalam rangka penetapan skala prioritas pembangunan sektor ekonomi yang merupakan keunggulan komparatif masing-masing wilayah menggunakan model pendekatan wilayah yaitu model ekonomi dasar *Economic Base Model*, model ini cocok untuk merencanakan pembangunan ekonomi wilayah-wilayah belum berkembang terutama untuk tingkat kabupaten.

Menurut Model ini, wilayah merupakan suatu sistem sosial ekonomi yang terpadu dimana wilayah ini melakukan interaksi ekonomi dengan wilayah lain dalam rangka penetapan skala prioritas pembangunan sektor ekonomi yang merupakan keunggulan komparatif masing-masing (Richardson).

Laju pertumbuhan wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan wilayah tersebut dalam memenuhi permintaan dari wilayah lain, selanjutnya perkembangan produksi di wilayah untuk memenuhi permintaan dari luar akan meningkatkan penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah tersebut sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Richardson mengembangkan suatu model ekonomi regional yakni Basis Ekonomi. Model ini dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah, dalam model ini kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dibedakan menjadi dua sektor, yakni:

1. Kegiatan sektor basis ekonomi

Adalah kegiatan ekonomi yang melayani pemasaran barang dan jasa produksi keluar batas wilayah (kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor)

2. Kegiatan sektor nonbasis ekonomi

Adalah kegiatan ekonomi yang hanya melayani kebutuhan barang dan jasa produksi untuk daerahnya sendiri.

Pada dasarnya model ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Adapun variabel yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien adalah variabel jumlah tenaga kerja, pendapatan, jumlah penduduk, area / kawasan, dan variabel lain yang dapat digunakan sebagai ukuran.

Secara matematis rumus LQ dapat dinyatakan dengan:

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Keterangan:

LQ = Koefisien *Location Quotient*

v_i = Jumlah tenaga kerja di sektor i di suatu kecamatan

v_t = Jumlah tenaga kerja total di suatu kecamatan

V_i = Jumlah tenaga kerja di sektor i di seluruh kecamatan

V_t = Jumlah tenaga kerja total di seluruh kecamatan

Untuk sektor i yang dimaksud adalah sembilan (9) sektor ekonomi yang meliputi: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; sektor perdagangan, perhotelan dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

I. Model Pelipatgandaan Tenaga Kerja

Dalam setiap pertumbuhan sektor basis dan nonbasis ekonomi memiliki efek pengganda terhadap perekonomian wilayah. Model ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan model basis ekonomi, dimana dalam setiap penambahan tenaga kerja di sektor basis maka akan mengakibatkan meningkatnya kesempatan kerja di sektor nonbasis.

Secara matematis model pelipatgandaan tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$MS = \frac{1}{1 - \frac{Y_n}{Y_t}}$$

Keterangan:

MS = Pelipatgandaan tenaga kerja

Y_n = Tenaga kerja sektor nonbasis

Y_t = Tenaga kerja total

Apabila :

1. Koefisien $MS > 1,1$ = Membuka lapangan kerja pada sektor basis sebanyak satu Orang.
2. Koefisien $MS < 1,0$ = Membuka lapangan kerja pada sektor basis sebanyak nol Orang (tidak menambah tenaga kerja).

Dengan asumsi bahwa lapangan kerja sebanding dengan pendapatan sehingga persentase pendapatan regional yang dibelanjakan dalam suatu kecamatan sama dengan persentase lapangan kerja regionalnya. Jika permintaan mengalami peningkatan baik di dalam wilayah sendiri maupun di luar wilayah, maka akan mengakibatkan aktivitas pada sektor nonbasis akan meningkat. Untuk itu peranan sektor basis sangat diperlukan dalam rangka pertumbuhan perekonomian wilayah dan secara keseluruhan proses perkembangan ekonomi tersebut akan meningkatkan kesempatan kerja melalui efek pelipatgandaan tenaga kerja.